


MATRIKS RENCANA AKSI PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

Instansi: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

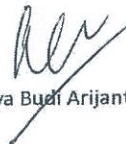
Sasaran: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisiensi dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	Reorganisasi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (Area Penataan dan Penguatan Organisasi)	Pengusulan reorganisasi dilingkungan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Januari - Desember	Direktur PPH	a	Diskusi/rapat	Januari - Maret	Rencana restrukturisasi organisasi
					b	Pengusulan ke BPOT	April	Nota Dinas usulan rencana restrukturisasi organisasi kepada BPOT
					c	Pembahasan/review	Mei - Desember	Laporan/notulensi pembahasan dengan BPOT
2	Pengembangan teknologi informasi (LOKAL, WBS dan E-Pengaduan) dalam rangka mempercepat proses pelayanan di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	Review dan perbaikan atas Aplikasi Layanan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	April - Desember	Direktur PPH	a	Diskusi/rapat	April - Mei	Laporan/notulensi analisa masalah
					b	Perbaikan aplikasi layanan	Juni - Agustus	Dokumen uji aplikasi
					c	Evaluasi	September- Desember	Dokumen evaluasi aplikasi
3	Penyusunan Proses Bisnis Direktorat PPH (Area Penataan Tata Laksana)	Tersusunnya peta proses bisnis Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Mei - Desember	Direktur PPH	a	Diskusi/rapat	Mei	Laporan/notulensi tentang rencana dilakukannya proses bisnis
					b	Penyusunan proses bisnis dan evaluasi/review	Mei - Desember	Laporan/notulensi pembahasan dengan BPOT
4	Revisi Peraturan Kepala LKPP tentang Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Area Penataan Peraturan Perundang-undangan)	Tersusnya Draft Peraturan LKPP tentang Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru	Mei - Desember	Direktur PPH	a	Diskusi/rapat	Mei	Laporan/notulensi pembahasan revisi peraturan whistleblowing system tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
					b	Penyusunan Draft Perlem WBS	Juni - Juli	Laporan/notulensi pembahasan dengan HSIK
					c	Pengusulan Draft ke HSIK	Agustus - Desember	Draft Peraturan LKPP tentang Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru

Mengetahui,
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa


Ikak G. Patriastomo

Jakarta, Mei 2019
Menyetujui,
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum


Setya Budi Arijanta